

Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Terancam Batal

Komisi VI DPR enggan menyetujui suntikan modal baru bagi Hutama Karya dan BUMN lain

Fahriyadi

JAKARTA. Rencana proyek pembangunan jalan trans Sumatera pada tahun ini berpotensi gagal. Penyebabnya, badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan sebagai pelaksana proyek itu, yakni PT Hutama Karya, bakal gagal mendapatkan suntikan modal. Komisi VI DPR enggan menyetujui penyertaan modal negara (PMN) untuk beberapa BUMN termasuk bagi Hutama Karya. Asal tahu saja, pemerintah sudah mengalokasikan dana investasi pada tahun ini Rp 15,57 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 9,73 untuk PMN,

antara lain ke Hutama Karya Rp 2 triliun, PT Krakatau Steel senilai Rp 956,50 miliar, PT BPUI Rp 250 miliar, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo masing-masing senilai Rp 1 triliun, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) senilai Rp 2 triliun, dan PT Geo Dipa Energi senilai Rp 500 miliar.

Sebenarnya, DPR sudah menyetujui PMN itu saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. Namun, untuk mencairkan dana ini, pemerintah masih butuh pembahasan dan persetujuan lagi di DPR.

Nah, saat rapat kerja antara Komisi VI dengan Kementerian BUMN, Senin (9/9) dan Se-

lasa (10/9), anggota DPR enggan menyetujui PMN itu. Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI beralasan, pihaknya tidak mengetahui rincian peruntukan dana PMN itu.

Anggota DPR khawatir, jika di proyek itu ada sengketa dan ada kasus korupsi, nama mereka bakal tercatut. Apalagi saat ini mendekati pelaksanaan pemilu 2014 sehingga sangat sarat dengan politis.

Tapi, akibat penolakan PMN ini, sejumlah proyek pun bisa tertunda. Terutama proyek jalan tol trans Sumatera yang rencananya mulai pembangunan pada Oktober 2013. Jika lancar proyek yang totalnya investasinya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 350

triliun ini bisa kelar di 2020.

Adapun proyeksi nilai proyek ini pada tahap pertama saja mencapai Rp 31,5 triliun (lihat tabel). Karena itu, HK butuh tambahan modal. Maklum proyek ini secara bisnis kurang menguntungkan tapi bisa mengangkat citra pemerintah jika proyek ini bisa jalan pada tahun ini.

Meski begitu, Kementerian BUMN sebagai pengusul PMN,

menastikan tetap akan mengupayakan persetujuan DPR. "Komisi VI tak mutlak menolak PMN ini dan masih bisa dibahas lagi," ujar Imam A. Putro, Sekretaris Kementerian BUMN, Selasa (10/9).

Menurutnya, dalam pembahasan nanti, Kementerian BUMN akan menegaskan pentingnya PMN itu. Diharapkan, hal itu bisa mengubah sikap kalangan DPR.

Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (Paket 1)

Ruas Tol	Panjang	Kebutuhan Investasi
Medan-Binjai	168 km	Rp 2 triliun
Pekanbaru-Dumai	135 km	Rp 14,7 triliun
Palembang-Indralaya	22 km	Rp 1 triliun
Bakauheni-Terbanggi Besar	150 km	Rp 13,8 triliun

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum